



Risalah Kebijakan

Nomor 2, Februari 2024



Optimalisasi Komunitas Belajar di Sekolah Guna Menyukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka



Ringkasan

- Pemerintah mendorong terbentuknya komunitas belajar di setiap sekolah sebagai bentuk dukungan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Komunitas belajar dapat menjadi forum untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi guru saat menerapkan Kurikulum Merdeka.
- Dalam pelaksanaannya, komunitas belajar di sekolah masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal itu disebabkan oleh: *pertama*, faktor internal berupa kurangnya kesadaran dan semangat belajar guru, minimnya kolaborasi, dan kecenderungan menunggu instruksi kepala sekolah. *Kedua*, faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan kepala sekolah dan kendala waktu untuk mengikuti komunitas belajar.
- Rekomendasi terhadap permasalahan tersebut, yaitu: 1) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) perlu mengoptimalkan sosialisasi komunitas belajar kepada dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. 2) Dinas pendidikan dan pengawas perlu melakukan sosialisasi, supervisi, dan evaluasi untuk mengoptimalkan keberadaan komunitas belajar di wilayah kerjanya. 3) Kepala sekolah perlu melakukan aktivasi komunitas belajar dengan berpedoman pada panduan dan menyesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah.

Konteks

Strategi implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dilakukan dengan cara menguatkan otonomi guru dan satuan pendidikan (Anggraena dkk., 2022). Hal ini terlihat dari tidak disediakannya pelatihan secara terpusat dan berjenjang bagi satuan pendidikan untuk menyiapkan proses IKM. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan enam jenis dukungan bagi satuan pendidikan, meliputi: 1) penguatan komunitas belajar di sekolah; 2) penyediaan aplikasi untuk belajar dan berbagi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM); 3) sosialisasi dan berbagi praktik baik melalui seri webinar IKM; 4) melakukan seleksi dan menyediakan daftar narasumber berbagi praktik baik (NSBPB); 5) mendorong peran serta mitra pembangunan untuk mendukung IKM; serta 6) menyediakan layanan bantuan (*helpdesk*) yang terbuka dan dapat diakses oleh satuan pendidikan. Dari keenam dukungan tersebut, komunitas belajar menjadi inti transformasi yang diharapkan terjadi di tingkat satuan pendidikan, di mana guru membentuk ekosistem belajar dan berbagi bersama rekan sejawatnya. Lima dukungan lainnya diharapkan dapat mendukung kegiatan komunitas belajar tersebut.



Gambar 1 Enam Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka

Komunitas belajar adalah kelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik (Ditjen GTK, 2023). Sejauh ini, terdapat tiga jenis komunitas belajar yang dapat diikuti oleh guru, yaitu komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antarsekolah, dan komunitas belajar daring di PMM. Ketiganya dapat menjadi wadah bagi guru untuk saling belajar dan berkolaborasi. Sebelum dikenalkan konsep komunitas belajar, para guru sebetulnya telah memiliki komunitas, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat daerah maupun di sekolah. Konsep komunitas belajar hadir untuk memperkuat fungsi dan keberadaan komunitas tersebut agar fokus mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Konsep komunitas belajar merujuk kepada *Professional Learning Community* (PLC) yang dikembangkan oleh DuFour (2004) yang berfokus pada permasalahan pembelajaran, bekerja secara kolaboratif, dan berpegang pada hasil belajar peserta didik. DuFour menggarisbawahi tiga strategi untuk mengoptimalkan komunitas belajar. *Pertama*, fokus pada pembelajaran peserta didik. Ketika belajar bersama di dalam komunitas, guru diharapkan berfokus pada upaya meningkatkan pembelajaran peserta didik. *Kedua*, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Sikap saling membantu, memiliki pemikiran terbuka, dan senang memecahkan masalah bersama perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Perkembangan belajar peserta didik tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing guru, namun menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan. *Ketiga*, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik dalam konteks pembahasan ini bukan berupa nilai yang menunjukkan kemampuan kognisi semata, namun berupa tercapainya kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komunitas belajar diharapkan dapat menjadi forum bagi guru untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik.

Di sisi lain, dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, keberadaan komunitas belajar di sekolah menjadi penting sebagai forum bagi guru untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran. Selain itu, komunitas belajar juga berperan sebagai wadah fasilitasi belajar bersama antarguru, memfasilitasi diskusi pemecahan masalah dan berbagi praktik baik, serta memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka, seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, bahan ajar, dan bahan asesmen (Direktorat SMP, 2023). Komunitas belajar di sekolah dapat menjadi forum belajar yang efektif karena dikelola sendiri oleh sekolah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah, termasuk sumber daya yang tersedia (Putra dkk., 2018).

Pada 2022, di awal sosialisasi pembentukan komunitas belajar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyediakan panduan awal bagi sekolah sebagai acuan untuk membangun komunitas belajar. Pada 2023, Kemendikbudristek menerbitkan *Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar* sebagai pembaruan dari panduan sebelumnya. Dalam panduan optimalisasi tersebut, cukup jelas dipaparkan definisi komunitas belajar, tujuan dibentuknya komunitas belajar, implementasi kegiatan komunitas belajar, serta peran dari para pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek, mitra pembangunan, dunia usaha dan dunia industri, serta orang tua/komite sekolah) dalam mendukung efektivitas komunitas belajar.

Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan menyediakan panduan terkait komunitas belajar, namun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Risalah kebijakan ini membahas berbagai permasalahan tersebut dan mengusulkan rekomendasi kebijakan berdasarkan dua studi yang telah dilakukan. *Pertama*, survei komunitas belajar yang dilaksanakan pada Oktober 2023 terhadap 50.314 sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka secara mandiri, baik pada kategori Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Masing-masing sekolah diwakili oleh satu kepala sekolah dan satu orang guru sebagai responden. *Kedua*, untuk mendalami kondisi komunitas belajar di sekolah, dilakukan pula studi kualitatif pada September-Oktober 2023 dengan mengunjungi sepuluh sekolah, antara lain SD (4 sekolah), SMP (4 sekolah), dan SMA (2 sekolah) di Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Bulungan, Kota Parepare, Kabupaten Buleleng, dan Kota Lhokseumawe.

Temuan #1: Sebagian besar sekolah telah memiliki komunitas belajar, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Konsep mengenai komunitas belajar telah diketahui oleh mayoritas kepala sekolah dan guru. Sebanyak 85,7% kepala sekolah dan 84,1% guru telah mendapatkan informasi mengenai komunitas belajar. Informasi tersebut diperoleh dari pengawas, rekan sejawat, maupun informasi dari PMM. Menurut jawaban kepala sekolah, sebanyak 70,4% sekolah telah memiliki komunitas belajar, sementara 29,4% lainnya belum memiliki komunitas belajar. Alasan kepala sekolah belum mengaktifkan komunitas belajar di sekolahnya, antara lain karena keterbatasan pemahaman mengenai konsep dan implementasi komunitas belajar (59,3%), keaktifan guru yang masih rendah (48,8%), minimnya anggaran sekolah untuk mendukung komunitas belajar (31,6%), belum adanya arahan dari dinas pendidikan maupun pengawas sekolah (19,1%), serta aktivitas mengajar guru sudah padat (15,8%).

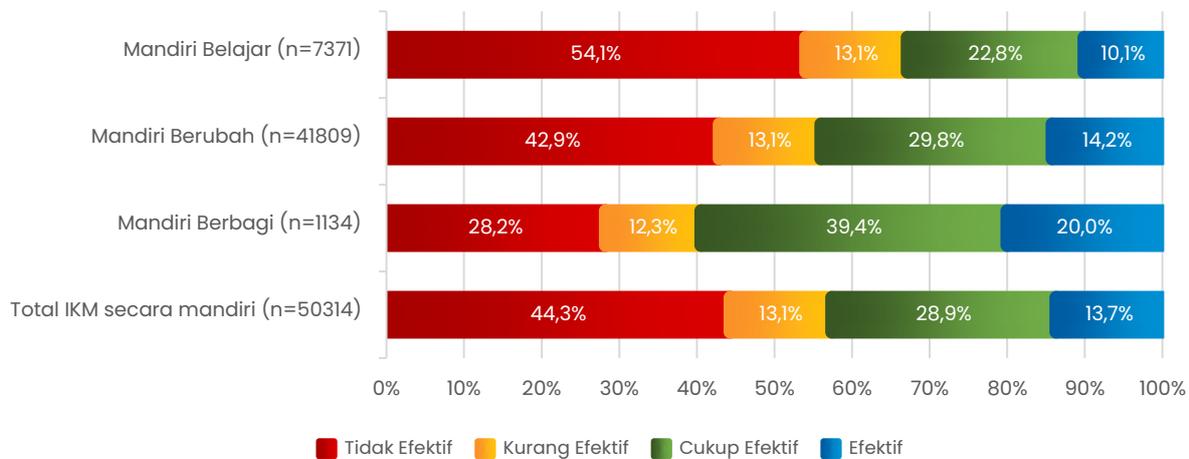
Hasil studi kualitatif menunjukkan sekolah-sekolah yang telah memiliki komunitas belajar mulai mengaktifkan komunitas tersebut sebagai forum belajar guru, terutama untuk mempelajari Kurikulum Merdeka. Di salah satu SMP negeri di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, para guru aktif menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar karena adanya penggerak komunitas yang berasal dari Guru Penggerak. Komunitas belajar banyak membahas topik yang sesuai dengan kebutuhan guru, dan menghadirkan narasumber terutama dari internal sekolah agar dapat memotivasi guru untuk terlibat aktif.

“Biasanya kami membuatkan google form supaya rekan-rekan bisa memilih topik apa yang menarik untuk dibahas. Dari hasil survei kecil itu, kami mengerucutkan kembali topik-topiknya dan mencari siapa narasumbernya. Untuk narasumber sejauh ini lebih banyak dari internal sekolah, seperti kepala sekolah atau Guru Penggerak.”
 (Guru Penggerak Komunitas di SMP Negeri di Kota Parepare, Sulsel)

Tidak semua sekolah yang telah memiliki komunitas belajar rutin menyelenggarakan kegiatan. Baru sekitar 38,8% sekolah yang rutin mengalokasikan waktu 1 jam per minggu, 15,0% per dua minggu, serta 26,7% per bulan untuk kegiatan komunitas belajar. Selain itu, masih terdapat 12,5% sekolah yang belum memiliki jadwal khusus untuk kegiatan komunitas belajarnya.

Survei yang dilakukan juga berupaya mendalami sejauh mana kondisi efektivitas kegiatan komunitas belajar di sekolah. Efektivitas kegiatan komunitas belajar tersebut diukur melalui tujuh aspek: 1) keberadaan tim penggerak komunitas; 2) komitmen dan nilai-nilai bersama yang dijalankan dalam komunitas; 3) pembelajaran secara kolektif dalam komunitas dan penerapannya dalam pembelajaran di kelas; 4) adanya kegiatan berbagi praktik dan refleksi bersama dalam komunitas; 5) alokasi waktu dan jadwal khusus untuk kegiatan komunitas; 6) kondisi komunitas belajar yang mendukung kerja sama dan ramah bagi anggotanya; dan 7) pemanfaatan dukungan Kemendikbudristek dalam kegiatan komunitas belajar.

Melalui tujuh aspek tersebut, diketahui bahwa sebagian besar komunitas belajar (sekitar 57,4%) masuk dalam kategori tidak efektif dan kurang efektif. Terdapat perbedaan yang cukup besar menurut kategori pelaksana IKM, di mana kategori Mandiri Berbagi memiliki kondisi yang lebih baik (59,4% cukup efektif dan efektif) dibandingkan dengan Mandiri Berubah (44,0%) dan Mandiri Belajar (32,9%) (Gambar 2).



Gambar 2 Sebaran Kondisi Komunitas Belajar pada Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Mandiri (n=50.314)

Temuan #2: Kurangnya semangat belajar, kolaborasi, dan kecenderungan menunggu arahan menjadi faktor internal yang menghambat keaktifan komunitas belajar.

Terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang menghambat guru menggerakkan komunitas belajar di sekolah. *Pertama, kurangnya semangat belajar guru.* Hasil survei menunjukkan bahwa di sekolah yang telah memiliki komunitas belajar, belum semua guru terlibat aktif. Masih terdapat sekitar 26,5% guru yang hanya kadang-kadang atau bahkan belum terlibat dalam kegiatan komunitas belajar. Kurangnya keaktifan guru ini menjadi salah satu kendala dalam upaya mengoptimalkan peran komunitas belajar di sekolah. Hasil survei juga menunjukkan, salah satu kendala dalam mengaktifkan komunitas belajar menurut kepala sekolah adalah kurang aktifnya para guru untuk mengikuti kegiatan komunitas (56,4%).

Temuan lapangan menjelaskan mengapa beberapa guru masih belum rutin dan aktif terlibat dalam komunitas belajar. Salah seorang guru di Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa kurangnya semangat belajar membuat dirinya belum rutin mengikuti komunitas belajar di sekolah.

“Saya sejauh ini belum rutin mengikuti KKG mini di sekolah. Alasan tidak ikut karena malas, susah menyerap materi yang disampaikan, dan faktor kesehatan juga cepat lelah. Saya juga berat meninggalkan kelas yang diajar, karena siswanya sering mencari saya jika tidak ada di kelas.”
(Guru senior di SD Negeri di Kab. Bulungan, Kaltara)

Kurangnya kesadaran dan semangat belajar guru turut memengaruhi jalannya komunitas belajar. DuFour (2004) menyatakan bahwa elemen penting terkait konsep PLC adalah komitmen dan ketekunan para guru untuk menerapkan prinsip pembelajaran kolektif di dalam komunitas belajar.

Kedua, kurangnya kolaborasi antarguru. Sebagian guru menilai bahwa kendala dalam mengaktifkan komunitas belajar salah satunya adalah keengganan untuk saling bekerja sama dalam komunitas belajar (14,2%). Hal ini juga sejalan dengan kendala lainnya yang juga disebutkan oleh guru, yaitu ketergantungan mereka terhadap keberadaan penggerak komunitas (41,4%). Dari temuan studi kualitatif di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terungkap bahwa keaktifan komunitas belajar sangat bergantung pada keberadaan penggerak komunitas dan terbangunnya semangat kolaborasi. Keberadaan penggerak komunitas menjadi penting untuk memotivasi dan mengorganisir kegiatan komunitas belajar. Namun, apabila iklim kolaborasi tidak terbentuk, kinerja komunitas belajar juga menjadi kurang optimal.

“Komunitas belajar akan tetap hidup apabila ada kolaborasi, sebab ke depan kita tidak bisa lagi hanya individual. Kami sangat berharap dukungan itu dari rekan-rekan guru, tetapi kadang ada yang berharap uang transpor untuk mengikuti kegiatan kumpul.”
(Guru Penggerak Komunitas di SMP Negeri di Kota Parepare, Sulsel)

Ketiga, kecenderungan guru menunggu instruksi dari kepala sekolah. Terdapat sebagian guru yang cenderung menunggu instruksi kepala sekolah untuk aktif berkegiatan pada komunitas belajar menjadi salah satu aspek yang menyebabkan implementasi komunitas belajar belum optimal. Pada sekolah yang belum memiliki komunitas belajar misalnya, terdapat 24,3% responden guru yang beralasan menunggu arahan kepala sekolah dan 15,7% guru menunggu arahan dinas pendidikan untuk mengaktifkan komunitas belajar. Sebagaimana telah dijelaskan pula pada temuan pertama, temuan studi kualitatif juga menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki motivasi dan kemampuan untuk menjadi penggerak komunitas, sehingga sebagian dari mereka umumnya menunggu untuk digerakkan, baik oleh penggerak komunitas maupun melalui arahan dari kepala sekolah maupun pengawas/dinas pendidikan.

Temuan #3: Keterbatasan waktu yang dimiliki guru dan kurangnya dukungan kepala sekolah menjadi faktor penghambat eksternal yang turut memengaruhi keaktifan komunitas belajar.

Selain faktor internal, terdapat permasalahan yang juga timbul dari luar diri guru (faktor eksternal). *Pertama, keterbatasan waktu dan kesulitan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan komunitas belajar.* Sebanyak 57,8% guru menganggap sulit menentukan jadwal kegiatan komunitas. Masalah waktu ini menjadi krusial karena sebagian guru memang memiliki jadwal mengajar yang padat, utamanya pada guru yang mengajar di beberapa kelas yang berbeda. Jam kerja guru dari pagi hingga pulang sekolah sudah diisi dengan kegiatan mengajar maupun mempersiapkan bahan ajar, menilai hasil kerja peserta didik, maupun tugas tambahan lainnya (misalnya sebagai pembina ekstrakurikuler, wakil kepala sekolah, bendahara, operator sekolah, dan lain-lain). Setelah jam pulang, sebagian guru memiliki tanggung jawab lain, seperti mengurus keluarga dan menyelesaikan urusan di luar pekerjaan mengajar. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi guru untuk aktif dalam komunitas belajar di sekolah.

“MGMP di sekolah belum aktif karena jadwal mengajar yang berbeda-beda, sehingga sulit mencari waktu yang tepat untuk pertemuan rutin. Sedangkan untuk dilakukan di sore hari, guru juga tidak bisa karena kendala lainnya, seperti fokus ke keluarga, menyelesaikan urusan di luar pekerjaan, dan sebagainya.”

(Waka Kurikulum SMA Negeri di Kota Lhokseumawe, Aceh)

Kedua, kurangnya dukungan kepala sekolah. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa sebagian guru menunggu arahan kepala sekolah. Namun, terdapat sekitar 15,1 % kepala sekolah yang belum membentuk tim penggerak komunitas. Hal ini menandakan kurangnya pemahaman kepala sekolah terkait pentingnya pembentukan tim penggerak komunitas tersebut untuk mengaktifkan komunitas belajar.

Studi lain juga menegaskan hal yang sama, di mana kendala dalam menjalankan komunitas belajar salah satunya karena kurangnya dukungan dari kepala sekolah (Affandi dkk., 2020). Data kualitatif kami juga menunjukkan gejala serupa, di mana kepala sekolah yang aktif dan memahami peran yang perlu dilakukan, terbukti dapat membentuk dan mengaktifkan kegiatan komunitas belajar. Dalam hal ini, sering kali kepala sekolah terlibat langsung mengisi kegiatan komunitas belajar dan mendampingi guru belajar, termasuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran.

“Kepsek telah berupaya menghidupkan kombel di sekolah dengan mengaktifkan kegiatannya pada setiap Jumat siang. Pembahasannya juga beragam, mulai dari P5 hingga dokumen-dokumen pembelajaran. Dalam kegiatan kombel, kepsek selalu turun dan mengajarkan langsung guru dan mendampingi guru untuk melakukan analisis CP ke ATP, menyusun modul ajar, dan lain-lain.”

(Waka Kurikulum SMA Negeri di Kota Lhokseumawe, Aceh)

Sebaliknya, keberadaan komunitas belajar maupun peran tim penggerak komunitas tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah.

“Dukungan kepsek belum sepenuhnya optimal. Istilahnya, Pak Kepsek tidak menghalang-halangi, tetapi tidak juga memberikan dukungan konkret. Jadinya saya merasa sendirian dan capek jika tidak didukung penuh oleh kepala sekolah.”

(Guru SD Negeri di daerah pelosok, Kab. Timor Tengah Utara, NTT)

Rekomendasi Kebijakan

Pembahasan di bagian sebelumnya menunjukkan terdapat dua persoalan penting dalam upaya menjadikan komunitas belajar sebagai pendorong transformasi yang diinginkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Pertama*, sebagian sekolah belum memiliki komunitas belajar. *Kedua*, sekolah yang telah memiliki komunitas belajar belum berjalan secara efektif dan optimal. Dua akar masalah telah diidentifikasi, yaitu adanya *hambatan internal*, seperti kurangnya semangat belajar guru, minimnya kolaborasi, dan budaya menunggu arahan, serta *hambatan eksternal*, yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki guru dan kurangnya dukungan kepala sekolah.

Sejumlah faktor penghambat tersebut saling memengaruhi. Misalnya, kurangnya kesadaran dan semangat belajar guru, minimnya kolaborasi, dan kecenderungan menunggu instruksi dapat terjadi karena kurangnya pemahaman guru terkait urgensi komunitas belajar di satu sisi, serta absennya kepemimpinan kepala sekolah di sisi yang lain.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kepala sekolah dapat memberikan dukungan yang optimal? Peran dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja kepala sekolah dalam upaya aktivasi komunitas belajar. Temuan studi kualitatif menunjukkan bahwa dinas pendidikan dan pengawas sekolah yang aktif melakukan koordinasi dan supervisi kepada sekolah dapat mendorong aktifnya komunitas belajar di wilayahnya (lihat Boks 1).

Aktor selanjutnya yang mempunyai peran penting adalah Kemendikbudristek, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) yang menangani pembinaan komunitas belajar di sekolah. Ditjen GTK sebagai perwakilan pusat dapat melakukan upaya komunikasi dan sosialisasi kepada dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru agar konsep dan implementasi komunitas belajar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh sekolah.

Berdasarkan penjabaran di atas, rekomendasi kebijakan yang diusulkan:

1. Ditjen GTK perlu meningkatkan sosialisasi komunitas belajar kepada dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru.

Sosialisasi mengenai komunitas belajar telah dilakukan baik oleh unit di Kemendikbudristek maupun melalui UPT di daerah. Namun, hal itu tetap perlu ditingkatkan. Sosialisasi kepada dinas pendidikan dan pengawas sekolah perlu fokus pada meningkatkan pemahaman mereka mengenai peran dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi berkala kondisi komunitas belajar di wilayah kerjanya. Sementara sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru penting dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya miskomunikasi dan miskonsepsi tentang implementasi komunitas belajar.

Terdapat beberapa instrumen sosialisasi yang telah diterbitkan, antara lain 1) Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar; 2) Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar; dan 3) Perdirjen GTK Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan. Berbagai instrumen sosialisasi tersebut perlu diperkuat sehingga dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dapat lebih memahami transformasi yang diharapkan melalui keberadaan komunitas belajar.

Lalu bagaimanakah model sosialisasi yang disarankan, khususnya kepada kepala sekolah dan guru? *Pertama*, selain menggunakan saluran seri webinar IKM yang sudah ada, sosialisasi melalui UPT Kemendikbudristek di daerah perlu terus dilakukan untuk menjangkau lebih banyak target audiens. Selain itu, perlu pula memanfaatkan komunitas belajar di tingkat daerah (seperti KKG, MGMP, MKKS, KKKS, dan lain-lain) sebagai kanal sosialisasi ke sekolah, sehingga terbentuk pemahaman yang sama mengenai peran penting masing-masing komunitas belajar, baik komunitas belajar antarsekolah maupun komunitas belajar dalam sekolah. *Kedua*, narasumber sosialisasi perlu memotivasi peserta untuk aktif bertanya, sehingga menjadi ajang berbagi sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. *Ketiga*, narasumber sosialisasi tidak

hanya sekadar menguasai panduan komunitas belajar, namun perlu mengaitkannya dengan persoalan riil dan kontekstual sesuai kondisi di sekolah. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan Dwi N. dkk. (2020) yang melihat permasalahan umum pada kegiatan sosialisasi, yaitu narasumber kurang mampu memotivasi peserta dan kurang mengkontekstualisasikan contoh, praktik, dan permasalahan sesuai kondisi peserta.

2. Dinas pendidikan dan pengawas perlu melakukan sosialisasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kondisi komunitas belajar di wilayah kerjanya.

Dalam menjalankan peran tersebut, dinas pendidikan dan pengawas sekolah dapat menggunakan *Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar* dan Perdirjen Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan sebagai pegangan. Pada intinya, dinas pendidikan dan pengawas sekolah perlu memastikan bahwa kepala sekolah dan guru memahami dan dapat menjalankan kegiatan komunitas belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini.

3. Kepala sekolah perlu melakukan upaya aktivasi komunitas belajar sesuai dengan konteks sekolah masing-masing.

Upaya ini dapat dilakukan dengan mengikuti panduan yang ada, serta memahami dan menemukan solusi sesuai konteks sekolah masing-masing. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman dan kesadaran para guru untuk dapat aktif dalam komunitas belajar di sekolah. Kepala sekolah juga perlu mengintegrasikan komunitas belajar ke dalam agenda dan program di sekolah. Komunitas belajar memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Beberapa hal penting yang perlu direncanakan oleh kepala sekolah dalam agenda kerjanya antara lain menyepakati jadwal diskusi dan refleksi secara rutin, membentuk tim penggerak komunitas, dan mengalokasikan anggaran sekolah untuk kegiatan komunitas belajar. Kepala sekolah juga perlu mendukung pembuatan jadwal mengajar yang fleksibel bagi guru, yang memungkinkan mereka untuk mencari dan menerapkan solusi dari masalah pembelajaran yang mereka hadapi (Affandi dkk., 2020). Penjadwalan diskusi rutin ini perlu disepakati dengan para guru sehingga dapat menjadi solusi dari kendala waktu dalam melaksanakan kegiatan komunitas belajar.

Boks 1 Praktik Baik Dukungan dari Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa program dan kebijakan yang mendukung aktivasi komunitas belajar di wilayah kerjanya.

Pertama, dinas pendidikan membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di tingkat kabupaten. TPK berperan sebagai helpdesk dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan menjadi narasumber yang dapat diundang oleh komunitas belajar antarsekolah maupun komunitas belajar dalam sekolah.

Kedua, dinas pendidikan mengaktifkan komunitas belajar antarsekolah (KKG/MGMP) dengan membaginya ke dalam tiga zona untuk memudahkan guru mengikuti kegiatan MGMP sesuai daerah terdekat. Sekolah diwajibkan mendukung guru aktif di MGMP dengan menganggarkan biaya transpor setiap bulan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Ketiga, mengaktifkan komunitas belajar di sekolah melalui kebijakan mewajibkan sekolah menganggarkan kegiatan refleksi di sekolah minimal satu bulan sekali dalam RKAS, serta memonitor dan mendampingi pelaksanaan kegiatan komunitas belajar melalui pengawas sekolah.



Gambar 3 Kegiatan IHT Diselenggarakan oleh MGMP dan Dinas Pendidikan

Daftar Pustaka

- Affandi, L.H., Saputra, H.H., Husniati, H., & Ermiana, I. (2020). Workshop penyusunan rencana pengembangan komunitas belajar profesional guru di SDN 10 Mataram dan SDN 30 Mataram. *Jurnal Warta Desa*, 1(3), 317-325.
- Anggraena, Y., Felicia, N., Ginanto, D. E., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., Widiawati, D. (2022). *Kajian Akademik: Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP, Kemendikbudristek
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2022). *Petunjuk awal membangun komunitas belajar dalam sekolah*. Jakarta, Indonesia: Kemendikbudristek.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2023). *Panduan optimalisasi komunitas belajar*. Jakarta, Indonesia: Kemendikbudristek.
- Direktorat SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (diunduh 10 November 2023) <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/komunitas-belajar-untuk-mendukung-kurikulum-merdeka/>
- DuFour, R. (2004). What is a “professional learning community”? *Educational Leadership*, 61(8).
- Dwi N., Susilastuti, Susilo, M., & Zudiyatko, Z. (2020). Model komunikasi dalam sosialisasi Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9, 49–59.
- Putra, H.R., Listyasari, W.D., & Soraya, E. (2018). Persepsi guru terhadap peran sekolah sebagai komunitas belajar profesional dalam perspektif guru Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah Jakarta Pusat. *iMProvement: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan*, 5(1), 1-10.
- Setiyati, S. (2014). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi Kerja, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 22(2).

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

Tito Erland S.
Lukman Solihin
Sisca Fujanita
Diyan Nur Rakhmah
Syelana Claudia